

ABSTRAK

PENGARUH KELEMAHAN SPI DAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP OPINI BPK DI LAMPUNG: TINDAK LANJUT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Menggunakan Metode Kualitatif dan Kuantitatif)

**Oleh
POPY LUKY**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) pada pemerintah daerah di Lampung, yang menunjukkan bahwa opini baik belum tentu mencerminkan kondisi fiskal yang sehat. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK, serta menguji tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai variabel moderasi. Hipotesis yang diajukan adalah SPI dan ketidakpatuhan berpengaruh negatif terhadap opini, dan tindak lanjut rekomendasi memperkuat pengaruh keduanya terhadap opini.

Penelitian menggunakan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif). Data kuantitatif berupa data sekunder Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan IHPS/IHPD tahun 2020–2024 pada 16 pemerintah daerah di Lampung. Analisis dilakukan dengan regresi logistik biner dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis dokumen dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan auditor BPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan berpengaruh negatif terhadap opini BPK. Secara simultan keduanya memiliki arah pengaruh negatif. Tindak lanjut rekomendasi tidak memoderasi pengaruh kelemahan SPI terhadap opini, namun mampu memoderasi pengaruh ketidakpatuhan terhadap opini. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketidakpatuhan yang disertai tindak lanjut nyata lebih efektif dalam meningkatkan kualitas opini audit dibandingkan perbaikan kelemahan SPI yang memerlukan waktu implementasi lebih panjang.

Kata Kunci : SPI, ketidakpatuhan, tindak lanjut rekomendasi, opini, PSH

ABSTRACT

THE EFFECT OF ICS WEAKNESSES AND NON-COMPLIANCE ON BPK OPINIONS IN LAMPUNG: FOLLOW-UP AS A MODERATING VARIABLE (Using Qualitative and Quantitative Methods)

**By
POPY LUKY**

This research is motivated by the increasing number of Unqualified Opinions with Emphasis of Matters (EOM) in local governments in Lampung, indicating that favorable opinions do not necessarily reflect a healthy fiscal condition. This study aims to examine the influence of Internal Control System (ICS) weaknesses findings and non-compliance with laws and regulations on BPK opinions, as well as to examine the follow-up actions on audit recommendations as a moderating variable. The proposed hypothesis is that ICS and non-compliance influence opinions, and follow-up actions on recommendations strengthen both influences.

The study uses a mixed approach (quantitative and qualitative). The quantitative data consisted of secondary data from the Audit Report (AR) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) and the Audit Results Report (IHPS/IHPD) for 2020–2024 from 16 local governments in Lampung. The analysis was conducted using binary logistic regression and Moderated Regression Analysis (MRA). A qualitative approach was employed through document analysis and Focus Group Discussions (FGDs) with BPK auditors.

The results showed that ICS weaknesses findings and non-compliance negatively affected the BPK's opinion. Simultaneously, both also had a negative effect. Follow-up on recommendations did not moderate the effect of weaknesses ICS on the opinion, but did moderate the effect of non-compliance on the opinion. These findings indicate that compliance improvements accompanied by concrete follow-up are more effective in improving audit opinion quality than ICS weaknesses improvements that require a longer implementation time.

Keywords: ICS, non-compliance, follow-up on recommendations, opinion, EOM